

## Motivasi Pembentukan Koalisi Mayoritas Pengusung Pasangan Calon Machfud Arifin dan Mujiaman Dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020

Moh. Ainul Yaqin<sup>1</sup>, Sri Budi Eko Wardani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia

<sup>2</sup>Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia

\*Email Korespondensi: muhammadyaqin43@gmail.com

---

### ABSTRACT

This study analyzes the process of forming a coalition of political parties with the majority supporting Machfud Arifin – Mujiaman. This study uses Geoffrey Pridham's motivational theory of coalition formation regarding the factors that can influence the formation of political party coalitions and rational choice theory to see the basic interests of actors in determining coalitions. This study uses a qualitative approach, with interview data collection techniques and documentation studies. The research findings show that the process of forming a coalition that carries Machfud Arifin – Mujiaman begins with a strategic discourse between Gerindra, PKB, PAN, NasDem, PPP, Golkar, Democrats and PKS which has a tactical orientation to overthrow the dominance of PDIP power in Surabaya since the reformation. The figure of Machfud Arifin as a former East Java Regional Police Chief became a trigger in the coalition formation process. There is a horizontal-vertical dynamic when each party encourages its cadres to become candidates for deputy mayor. Theoretically, the formation of the supporting coalition is influenced by three basic things, namely ideological factors which are the initial thoughts of the majority party which emphasizes leadership renewal, then the historical party that has existed since before the 2020 elections were held and finally pragmatic factors with ambitions to gain power by merging eight political parties. . The appointment of Machfud Arifin is a rational choice, considering the number of electability surveys, financial capital and political networks owned by candidates.

Keywords: Political Coalition, Pilkada 2020, Machfud Arifin, Surabaya

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis proses pembentukan koalisi partai politik mayoritas pendukung Machfud Arifin – Mujiaman. Penelitian ini menggunakan teori motivasional pembentukan koalisi Geoffrey Pridham mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi pembentukan koalisi partai politik dan teori pilihan rasional (*rational choice*) untuk melihat kepentingan dasar para aktor dalam menentukan koalisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan proses pembentukan koalisi pengusung Machfud Arifin – Mujiaman diawali wacana strategis antara Gerindra, PKB, PAN, NasDem, PPP, Golkar, Demokrat dan PKS yang

memiliki orientasi taktis menumbangkan dominasi kekuasaan PDIP di Surabaya sejak reformasi. Figur Machfud Arifin sebagai mantan Kapolda Jatim menjadi *trigger* dalam proses pembentukan koalisi. Terdapat dinamika horizontal-vertikal ketika masing-masing partai mendorong kadernya untuk menjadi calon wakil wali kota. Secara teori pembentukan koalisi pengusung dipengaruhi oleh tiga hal mendasar, yakni faktor ideologis yang merupakan pikiran awal partai mayoritas yang menekankan pembaharuan kepemimpinan, kemudian historis partai yang telah terjalin sejak sebelum pilkada 2020 digelar dan terakhir faktor pragmatis dengan ambisi untuk meraih kekuasaan dengan penggabungan delapan partai politik. Pengusungan Machfud Arifin adalah pilihan rasional, bahwa angka survei elektabilitas, modal finansial dan jejaring politik yang dimiliki kandidat.

Kata kunci: Koalisi Politik, Pilkada 2020, Machfud Arifin, Surabaya

.

.

---

**Pendahuluan**

Pilkada Surabaya tahun 2020 diikuti oleh dua pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pertama, pasangan calon Eri Cahyadi dan Armuji yang didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkoalisi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dengan jumlah kursi dua partai ini di DPRD Kota Surabaya mencapai 19 kursi. Eri Cahyadi memiliki latar belakang birokrat dengan jabatan terakhir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya. Namun karena kedekatannya dengan Walikota Tri Rismaharini, Eri Cahyadi direkomendasikan untuk diajukan sebagai calon walikota melalui PDIP. Sementara itu, Armuji merupakan kader PDIP yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Surabaya dan terakhir sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024.

Pasangan calon Machfud Arifin dan Mujiaman Sukirno yang didukung oleh koalisi 8 partai politik yaitu Golkar, Demokrat, PKS, PKB, PAN, Nasdem, Gerindra dan PPP, dengan jumlah total 31 kursi (62%). Machfud adalah purnawirawan polisi dengan pangkat terakhir jenderal bintang dua dan jabatan terakhir sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur pada 2018. Machfud sebenarnya sudah pernah terjun dalam dunia politik yaitu pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Timur pasangan calon Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sedangkan pasangan calon wakil walikota Mujiaman tercatat pernah menjabat sebagai Dirut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya.

Fenomena politik tersebut menjadi menarik jika melihat peta kekuatan koalisi partai politik pendukung Mahfud – Mujiaman yang mendapat dukungan partai mayoritas dengan jumlah koalisi delapan partai politik. Jika ditinjau dari pengalaman pelaksanaan pilkada di beberapa daerah, calon yang diusung oleh koalisi besar tidak selalu memberikan kemenangan. Sementara itu, (Nurhasim, 2018) menyebut pertimbangan lain dalam membentuk koalisi partai dengan menggandeng partai mayoritas dikarenakan dengan menciptakan calon tunggal maka peluang memenangkan kompetisi semakin besar. Partai politik kemudian berhimpun dalam sebuah koalisi tanpa memperdulikan ideologi, platform partai, kebijakan partai dan alasan-alasan rasional lainnya.

Dalam setiap pilkada, terdapat variasi kecenderungan pembentukan koalisi. (Makhasin, 2016) mengklasifikasikan tipologi koalisi dalam pilkada antara lain: Koalisi Kecil Ideologis (KKI), gabungan suara kurang dari 30% dan atau partai pendukung kurang atau sama dengan 3, satu garis dalam identitas ideologis dan atau orientasi kebijakan, satu partai dominan sebagai pemimpin koalisi; Koalisi Kecil-Pragmatis (KKP), gabungan suara kurang dari 30% dan atau partai pendukung kurang atau sama dengan 3, lintas ideologi kebijakan, tidak ada partai

dominan, adanya figur kuat struktural/non-struktural partai sebagai sponsor/penyandang dana; Koalisi Besar-Ideologis (KBI), gabungan suara lebih dari 30% kursi dan atau partai pendukung lebih dari 3, satu garis dalam identitas ideologis dan atau orientasi kebijakan, satu partai dominan sebagai pemimpin koalisi; dan Koalisi Besar-Pragmatis (KBP), gabungan suara lebih dari 30% dan atau partai pendukung lebih dari 3, lintas ideologi dan orientasi kebijakan, tidak ada partai yang dominan, figur kuat non struktural partai sebagai sponsor/penyandang dana. Studi yang lain juga hampir menyebut hal yang sama bahwa koalisi sangat beragam dan begitu variatif. Dari argumen literatur di atas telah ada kajian yang mengulas tema koalisi partai politik namun pembahasan penelitian tersebut belum ditemukan yang secara eksplisit fokus terhadap koalisi partai banyak yang dibangun dalam rangka menantang calon yang diusung oleh partai petahana.

Tabel 1

Peta Partai Politik Berdasarkan Kursi DPRD Kota Surabaya 2019-2024

Partai Politik	Kursi	Perolehan Suara
PKB	5 kursi	153.509 suara
Gerindra	5 kursi	128.016 suara
PDIP	15 kursi	418.872 suara
Golkar	5 kursi	115.129 suara
NasDem	3 kursi	86.264 suara
PKS	5 kursi	116.137 suara
PPP	1 kursi	56.242 suara
PSI	4 kursi	90.758 suara
PAN	3 kursi	78.263 suara
Demokrat	4 kursi	119.783 suara
<b>Jumlah</b>	<b>50 kursi</b>	

Sumber: *kpu-surabayakota.go.id*

Secara resmi koalisi partai pendukung Machfud Arifin dan Mujiaman mendeklarasikan diri pada 26 Januari 2020 bertempat di Machfud Arifin Center, Surabaya. Deklarasi tersebut masih diikuti oleh lima partai politik, yakni PKB, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN dan PPP. Para lima ketua partai tingkat Kota Surabaya tersebut membacakan deklarasi dengan berjanji akan memenangkan pasangan Machfud Arifin dan Mujiaman. Sepekan sebelum deklarasi, Ketua DPW PAN Jatim, Masfuk, telah menyerahkan surat rekomendasi mulai tingkat DPD Kota Surabaya, DPW Jatim hingga DPP PAN kepada Machfud Arifin. PAN secara luas menyerahkan sepenuhnya kepada Machfud Arifin untuk memilih calon wakil walikota yang akan mendampingi. Alasan PAN mendukung Machfud Arifin dikarenakan sosok Machfud yang sudah sangat berpengalaman di instansi kepolisian dan pernah menduduki posisi sebagai Kapolda Jatim. Mahcfud, jika terpilih, diharapkan dapat memberikan perubahan signifikan dalam pembangunan Kota Surabaya. Setelah deklarasi tersebut, menyusul tiga partai lagi yang akhirnya memberikan dukungan, yaitu Golkar, Nasdem, dan PKS. Golkar mulanya

merasa kecewa karena Machfud Arifin tidak memilih wakil yang direkomendasikan. Kendati demikian, Golkar berjanji tetap sesuai komitmen untuk terus mendukung paslon Machfud Arifin dan Mujiaman di pemilihan kepala daerah serentak 2020. (Makhasin, 2016)

Selain partai politik, peran pasangan calon memiliki daya tarik utama dalam pembentukan koalisi. Machfud Arifin sebagai tokoh sentral dalam proses pencalonan tersebut tidak terlepas dari proses loby-loby politik hingga terjadinya keputusan partai dalam memberikan dukungan hingga terbentuknya koalisi. Delapan partai tersebut banyak menimbang latar belakang pasangan calon untuk ditawarkan kepada konstituen pada pelaksanaan pilkada. Seperti Machfud Arifin yang memiliki pengalaman sebagai perwira di kepolisian dengan pangkat terakhir jenderal bintang dua. Begitu juga wakilnya Mujiaman Sukirno yang merupakan seorang birokrat di pemerintah kota Surabaya dengan jabatan Dirut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya. Pemberian dukungan juga sebabkan semakin populernya nama Mahfud di bursa kandidasi calon walikota Surabaya.

Delapan partai politik koalisi pendukung Machfud Arifin – Mujiaman diyakini telah memiliki kesepakatan politik terkait arah ke depan jika calon yang didukung mendapat kemenangan. Kesepakatan tersebut tentu bisa berupa kebijakan atau hal lain yang menjadi keuntungan bagi masing-masing partai, (Nurhasim, 2018). Sehingga menurut hemat peneliti, ada satu *trigger* yang menjadi alasan kuat bagi delapan partai pendukung yang secara ideologi memiliki banyak perbedaan kemudian memutuskan untuk dalam satu koalisi. Sedangkan, di sisi lain, PDIP yang memiliki 15 kursi di DPRD, dan bisa mengajukan calon tanpa koalisi, membutuhkan waktu lebih lama untuk menentukan kandidat. Terjadi tarik menarik antar-elite pimpinan partai di daerah dengan pusat. Hingga 30 Agustus 2020, dua bulan sebelum pemilihan, PDIP belum mengumumkan pasangan calon yang diusung. Banyak pengamat politik menilai bahwa DPP menginginkan Wishnu Sakti Buana yang juga wakil walikota saat ini, sementara Tri Rismaharini sebagai walikota lebih memilih Eri Cahyadi meneruskan kepemimpinannya.

Geoffrey Pridham dalam jurnalnya *Parliamentary Affairs* yang diterbitkan pada 1987 menjelaskan koalisi partai politik mulai banyak dilakukan pasca perang dunia kedua di belahan Eropa. Berdasarkan aplikasi sederhana dari model matematika teori ini dioperasikan pada asumsi umum yang rasional, yakni dilatarbelakangi proses pengambilan keputusan. Artinya partai politik bersatu sebagai koalisi para aktor politik. Tujuannya pemerintahan koalisi harus memerintahkan dukungan mayoritas pada unsur legislatif. Partai-partai dimotivasi oleh *eiths power* (memegang jabatan) atau tujuan dasar kebijakan, atau bahkan keduanya. Sementara itu, karakter gerakan koalisi dari para elit politik cenderung menghalalkan segala cara demi

mencapai kekuasaan. Koalisi secara kata dapat diartikan sebagai bergabung untuk dan koalisi dalam pemahaman ini adalah penggabungan parpol untuk menjagokan kandidat dengan harapan terjadi *power sharing* atau pembagian kekuasaan. Koalisi tidak berarti penggabungan ideologi, melainkan hanya bentuk fisiknya saja, sehingga dapat dikatakan bahwa koalisi hanya bersifat momentum semata atau insidental, lebih jauh lagi koalisi tidak bersifat menetap. Walaupun demikian koalisi tidak berarti terjadinya *power sharing*, karena hal itu sangat bergantung pada system pemerintahan yang dianut, sehingga koalisi akan sangat bermanfaat jika sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem parlementer, tetapi akan sangat bergantung pada presiden terpilih jika sistem yang dipakai adalah sistem presidensial. Kemudian dalam hal ini, peneliti akan menganalisis seperti apa proses dan motivasi dari pembentukan koalisi pada Pilkada.

Dalam penelitian (Skjæveland et al., 2007) yang memfokuskan pada pemerintahan lokal di Denmark terdapat tiga ribu pemerintahan lokal bahwa elite-elite pemerintah lebih suka untuk melakukan kerjasama atau koalisi. Sehingga koalisi yang terbentuk selalu koalisi besar. Koalisi besar hampir menjadi bentuk dari pemerintahan lokal di Denmark. Hasil penelitian ini menyanggah bahwa koalisi minimal lebih disukai elite partai. Elite-elite politik lebih suka membentuk *oversized coalition* dibandingkan *minimum coalition*. Kemenangan mayoritas yang ingin dicapai partai membuat rekrutmen politik untuk pencalonan pilkada oleh partai politik bersifat sentralistis dan informal, serta menggunakan pertimbangan pragmatis dengan menambahkan syarat kemampuan finansial dan tingkat elektabilitas calon, sehingga lebih memberi jalan bagi calon yang berlatar belakang dinasti (Fitriyah, 2020). Argumen serupa, dalam iklim demokrasi kekinian, rekrutmen bakal calon kepala daerah yang dilakukan partai terkesan tidak memiliki proses yang jelas (Ardiani et al., 2019). Menurutnya, publik tidak pernah mengetahui seperti apa mekanisme yang dilakukan parpol dalam menentukan calon kepala daerah hingga menjadi kandidat.

Dari uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana motivasi pembentukan koalisi partai politik mayoritas pengusung Machfud Arifin dan Mujiaman. Secara garis besar penelitian ini melihat bagaimana terjadinya proses pembentukan koalisi partai politik dengan kursi mayoritas (*oversized*) yang mendukung Machfud Arifin – Mujiaman dalam Pilkada Surabaya serta faktor apa saja yang melatar belakangi proses terjadinya pembentukan koalisi tersebut.

---

**Landasan Teoritik**

Semenjak era Yunani kuno, sistem politik demokrasi jadi opsi yang baik serta rasional bila digunakan dalam sistem pemerintahan suatu negeri modern. Karena, nilai- nilai demokrasi merupakan sistem yang bisa mengakomodir kepentingan serta hak tiap masyarakat negeri. Dalam sistem demokrasi, seseorang pemimpin hendak diseleksi oleh rakyat baik lewat pemilu langsung (*direct democracy*), ataupun lewat sistem perwakilan (*in-direct-democracy*). Tetapi, di masa modern saat ini ini pemilu secara tidak langsung jadi alternatif yang sangat sesuai dengan warga modern serta kompleksitas kasus serta kewilayahan sesuatu negeri.

(Budiarjo, 2008) mengatakan pemilu ataupun sistem pemilu dikira selaku lambang, sekalian tolak ukur dari demokrasi. Sehingga, tidak terdapat negeri di dunia ini yang tanpa pemilu dikira selaku negeri yang demokratis. Banyak negeri yang mempraktikkan rezim totaliter, otoriter semacam negara- negara timur tengah malah berbondong- bondong mengarah negeri yang demokratis. Negara demokrasi dapat dilihat pada gimana proses rotasi kekuasaan lewat sistem pemilu. Pemilu adalah, metode menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon (Marijan, 2019). Pemilu itu sendiri dibagi jadi sebagian tingkatan ialah pemilu Presiden, Legislatif, pemilu gubernur serta Bupati/Walikota. Terus menjadi banyak suara yang dimenangkan oleh partai politik, hendak berbading lurus dengan banyaknya sofa yang didapatkan oleh suatu partai tertentu bila sistem pemilu memakai sistem proporsioanal, misalnya Indoensia, Belanda serta Prancis.

Tetapi, perihal itu hendak berbeda bila sistem pemilu sesuatu negara memakai sistem distrik, semacam Amerika, Inggris serta Malaysia. Dalam konteks ini, sistem demokrasi wajib senantiasa mencari format yang cocok dengan sosio-masyarakat sesuatu negara, baik budaya politik sampai konteks teritorialnya. Demokrasi merupakan suatu proses, bukan bentuk yang sudah berakhir, demokrasi menunjuk pada kegiatan yang dinamis, bergerak terus, tidak pernah berhenti (Kumolo, 2015). Maksudnya kalau demokrasi tidak berhenti begitu saja dengan terdapatnya pemilu serta lain- lain yang telah di praktikkan di negeri- negeri berkembang. Hendaknya demokrasi senantiasa mencari desain, format yang hendak senantiasa berganti sejauh perubahan itu hendak berakibat luas kepada kehidupan yang demokratis serta berkeadilan sosial untuk segala warga suatu negeri.

Di dalam pemikiran politik modern, keberadaan partai politik merupakan suatu keniscayaan, apalagi kedatangan partai politik merupakan aset penting suatu negara. Partai politik memiliki kedudukan serta fungsi yang strategis dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis. Secara universal, partai politik bisa dikatakan kalau partai politik merupakan sesuatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai- nilai

(*values*), ataupun cita- cita yang sama (Budiarjo, 2008). Dengan penafsiran tersebut bisa diterjemahkan kalau tiap partai politik tentu memiliki cita- cita yang sama dari segala pengurus serta kadernya masing-masing.

Tujuan universal dari partai pasti bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, sokongan (*voters*) dalam proses politik atau pemilu. Dengan memperoleh dukungan politik (*voters*) yang banyak, partai politik hendak memperoleh kekuasaan konstitusional serta jadi tujuan akhir dari suatu partai didirikan. Memanglah politik modern merupakan politik kepartaian. Partai- partai politik ialah aktor- aktor utama di dalam sistem yang menghubungkan antara kewarganegaraan dengan proses pemerintahan. Partai politik memilah bermacam kehendak warga- negara, yang sebagian besar di antara lain terungkap melalui kepentingan- kepentingan di pelbagai kelompok ataupun media massa (Sabatier, 1999). Kedatangan partai politik selaku aset negara pasti sangat diperlukan di dalam kehidupan demokrasi modern dalam proses rotasi kekuasaan yang legal. Namun, partai politik sudah pula diadopsi oleh rezim-rezim politik yang tidak memahami pemilihan serta parlemen, serta oleh rezim-rezim yang melancarkan pemilihan pura-pura dan mengadakan parlemen yang pura-pura pula, di mana satu-satunya kandidat ditawarkan selaku calon buat diseleksi, ataupun di mana cuma satu partai saja menduduki dalam tubuh legislatif (Duverger, 1981).

Aplikasi kuasi-demokrasi tersebut dapat kita amati di beberapa negara yang berideologi sosialis-komunis. Kalau dari konteks Indonesia pernah terjadi pada masa rezim Orde Baru. Partai Golkar yang merupakan kepunyaan pemerintah senantiasa mendominasi perwakilan di parlemen, sampai struktur kekuasaan pada kekuasaan satu partai politik. Kondisi ini menunjukkan kalau kedatangan partai politik bisa diadopsi di bermacam rezim politik sesuatu negara.

## Metode Penelitian

Metode Penelitian Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan riset permasalahan bertujuan mendapatkan uraian secara mendalam serta komprehensif tentang suatu fenomena yang dirasakan subyek riset, misalnya: sikap, anggapan, motivasi, serta lain-lain secara holistik serta dengan metode deskripsi dalam wujud perkata serta bahasa pada sesuatu konteks spesial yang alamiah (Moleong, 2008). Pendekatan yang dipakai merupakan riset permasalahan *tacit knowledge* yang bermaksud mendeskripsikan hasil riset serta menciptakan cerminan merata dalam sesuatu kondisi. Pengetahuan yang ada di dalam otak ataupun benak seorang cocok dengan uraian serta pengalaman orang itu sendiri. Umumnya pengetahuan ini tidak terstruktur, sulit untuk didefinisikan serta diberitahukan dengan bahasa

resmi kepada orang lain serta isinya mencakup uraian individu. Pengetahuan ini biasanya belum terdokumentasi sebab pengetahuan ini masih ada di dalam benak seorang. Pendekatan ini dipilih karena fenomena yang diteliti merupakan sebuah kasus yang memerlukan pengkajian secara deskriptif kualitatif yang mendalam (Moleong, 2008). Bagi (Yin, 2013), pendekatan studi permasalahan bisa didefinisikan selaku aktivitas inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena serta konteks tidak nampak dengan tegas serta dimana multisumber fakta dimanfaatkan. Pendekatan riset permasalahan sesuai dipakai buat mendalami persoalan kenapa ataupun bagaimana atas suatu fenomena (Yin, 2013). Pada penelitian ini, fenomena yang ingin didalami adalah motivasi apa yang melatarbelakangi pembentukan koalisi partai mayoritas pengusung Machfud Arifin – Mujiamana pada pilkada Kota Surabaya tahun 2020.

### **Analisis Penelitian dan Pembahasan**

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dijelaskan bahwa pendaftaran calon pemimpin daerah harus melalui partai politik dengan surat rekomendasi yang ditandatangani oleh pengurus pusat (DPP). Artinya, meski pengurus partai di daerah telah memutuskan kandidat yang akan diusung dalam Pilkada tetapi keputusan final berada di tangan DPP partai. Sehingga dalam praktiknya, walau pengurus daerah yang mengetahui dinamika dan peta perpolitikan di daerah namun semua itu tidak akan ada artinya jika DPP telah memiliki keputusan. Besarnya peran DPP tersebut, mengharuskan DPD hanya sebagai pemberi pertimbangan keputusan dalam pengusungan calon kepala daerah. Adapun misal adanya proses penjaringan calon oleh DPD tidak memiliki keputusan mengikat karena masih harus melakukan lobi politik di DPP. Rekomendasi DPP partai inilah yang digunakan sebagai lobi pembentukan koalisi bagi bakal calon yang membutuhkan kendaraan untuk maju dalam pilkada.

#### **1. Wacana Pembentukan Koalisi Strategis**

Pada pertengahan tahun 2019, konstelasi politik mulai terbentuk, partai-partai mulai berdinamika, menyusun agenda atau strategi dalam menyambut momentum Pilkada Surabaya tahun 2020. Kepemimpinan Kota Surabaya yang telah lama dikuasai oleh partai penguasa, yakni PDIP memunculkan wacana-wacana kepemimpinan baru untuk Surabaya. Akan tetapi, pada umumnya partai politik berorientasi untuk menang dalam Pilkada. Sehingga wacana tersebut tidak terlalu signifikan adanya, sebab kekuatan PDIP memang sulit untuk ditumbangkan, baik dalam konteks popularitas, elektabilitas, serta modal politik yang mapan.

Kekuatan PDIP tersebut tidak berarti menjadikan konstelasi dan dinamika politik menjadi stagnan. Wacana pergantian kepemimpinan di Surabaya untuk memunculkan figur yang baru sebagai Wali Kota Surabaya semakin masif adanya, seiring berjalannya proses Pilkada. Kondisi tersebut membuat partai-partai di luar PDIP, yakni Gerindra, Golkar, NasDem, PAN, PKS, Demokrat, PKB dan PPP mulai menghitung kekuatan di DPRD untuk merebut kekuasaan. Delapan partai politik menyadari perolehan suara pada pemilu sebelumnya tidak mampu untuk mengusung calon secara mandiri. Atas dasar tersebut maka partai-partai memerlukan kekuatan dengan cara koalisi.

(Pridham, 1987), konsepnya dapat menjelaskan terbentuknya suatu dinamika dan proses koalisi partai politik. Dalam proses koalisi tersebut, partai politik cenderung akan lebih mempertimbangkan beberapa faktor yang digunakan dalam memahami proses koalisi tersebut, dimensi yang digunakan adalah dimensi motivasional. Inti dasar dari dimensi ini adalah suatu koalisi antar partai politik bisa terbentuk atas dua hal, yaitu atas dasar kedekatan kebijakan (*trade-off*) antara tujuan "*office seeking*" dan komitmen terhadap suatu kebijakan. Misalnya motivasi di antara mitra koalisi atas isu-isu kebijakan, seberapa jauh prioritas isu tersebut dapat berhubungan dengan strategi atau identitas partai. Dalam poin ini koalisi terjadi atas dasar kedekatan kebijakan dan tujuan yang sama antar partai.

Pada prosesnya, untuk memenangkan Pilkada dan menumbangkan kekuasaan PDIP di Surabaya dibutuhkan kandidat yang mumpuni serta memiliki kans kemenangan yang tinggi. Mula-mulanya Partai Gerindra membuka penjangkaran seluas-luasnya untuk melihat seluruh potensi kandidat baik dari unsur kader maupun non partai. Pendaftaran yang dibuka pada 25 Oktober hingga 15 November 2019 itu mengunggulkan nama Machfud Arifin sebagai bakal calon wali kota. Dengan demikian DPD Gerindra Surabaya melihat bahwa terdapat beberapa bakal calon dari non kader partai yang turut berpartisipasi dalam momentum ini. Selain kandidat, partai politik sebagai mesin politik dalam Pilkada perlu disiapkan sebaik mungkin. Jika hanya Gerindra sendiri yang mengusung kandidat, maka tidak akan memenuhi prasyarat awal, yakni minimal perolehan suara 20% di kursi DPRD untuk mencalonkan kandidat. Dengan demikian, menjadi hal penting untuk memperhatikan mitra koalisi partai politik, baik itu dalam konteks jumlah perolehan kursi di DPRD, basis massa di daerah, serta citra partai politik.

Meski tidak secara terbuka, beberapa partai juga membuka pendaftaran untuk bakal calon, seperti PAN, NasDem, dan Golkar. Namun nama Machfud Arifin selalu muncul sebagai *runner up* di setiap partai. Oleh karenanya partai-partai membuat ranking dan akhirnya sepakat untuk mengusung Machfud Arifin. Gagasan pembaharuan Surabaya oleh partai-partai politik,

khususnya dalam konteks kepemimpinan pemerintahannya diidentikkan dengan figur Machfud Arifin. Sehingga sosoknya dianggap paling tepat sebagai upaya dalam menumbangkan kekuasaan PDIP.

Dapat dipahami bahwa motif dari delapan partai itu adalah bagaimana partai tersebut dapat menumbangkan dan merebut kekuasaan dari PDIP. Kepentingan terhadap aspek kekuasaan semata dapat dikatakan sebagai langkah pragmatis dari partai politik. Pada konteks ini, (Efriza, 2012) berpendapat bahwa koalisi yang terbentuk atas dasar kepentingan pragmatis, yakni untuk memperoleh kekuasaan semata disebut dengan koalisi taktis. Pola koalisi tersebut dapat terbentuk karena tiada lain koalisi merupakan alat atau strategi yang cukup efektif dalam memperoleh kekuasaan dan meraih suara.

Bila ditelaah lebih lanjut wacana pembaharuan di Surabaya merupakan respon partai-partai atas kondisi sosial-politik yang terjadi selama bertahun-tahun di Surabaya. Kepemimpinan Surabaya telah hampir 20 tahun dikuasai oleh partai tunggal yaitu PDIP. Mahfudz, Wakil Ketua DPC PKB Surabaya, menyebutkan selama PDIP berkuasa di Surabaya banyak kebijakan wali kota yang menguntungkan kadernya. Bahkan struktur kekuasaan paling rendah seperti RT/RW banyak diisi oleh kader maupun simpatisan PDIP. Cara politik yang dilakukan PDIP tersebut yang selalu menguntungkan partainya di setiap pemilu. Maka dari kegelisahan itu, para partai politik merasa ada titik temu untuk merobohkan kekuasaan PDIP di Surabaya dengan mengusung kandidat potensial yakni Machfud Arifin.

Sebagaimana pendapat (Pridham, 1987) bahwa faktor sosio-politik merupakan isu sosial-politik di daerah tersebut yang dapat membangun frame atau kepentingan yang sama, sehingga terbentuklah koalisi. Dengan demikian, semangat tersebut yang menjadi titik temu partai-partai berada pada sosok Machfud Arifin untuk menggulingkan kekuasaan PDIP dengan membangun koalisi dan memenangkan Pilkada Surabaya 2020. Selain itu, rencana koalisi besar tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Machfud Arifin awalnya hanya ingin menggandeng partai secukupnya sebagai syarat maju di Pilkada. Namun karena partai-partai merasa figurnya dapat mewakili kepentingan politik partai maka yang terjadi adalah terbentuknya koalisi besar agar peluang kemenangan semakin dapat diraih.

Selain karena potensi kemenangan lebih besar, Parpol lain pun akan tertarik berkoalisi dengan partai yang memiliki basis massa yang besar, atau pemilih yang banyak. Sehingga dapat mewujudkan *Grand Coalitions*, yakni koalisi besar yang terdiri dari beberapa partai politik pemenang (Jalal, 2021). Sehingga rancangan kebijakan pembaharuan Surabaya dalam pembangunan kota dapat lebih efektif terealisasi dengan kekuatan kolektif yang dibangun melalui koalisi Parpol. Sehingga pendekatan tersebut lebih menekankan pada *policy based*

*coalitions*, yakni koalisi yang terbentuk berdasarkan pada kepentingan kebijakan atau program-program ideologis dari Parpol yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan Parpol lainnya. (Efriza, 2012) berpendapat bahwa koalisi yang terbentuk atas dasar kepentingan visi dan ideologi partai politik disebut dengan koalisi strategis.

Dalam perspektif teori lain oleh (Lijphart, 1984), yang menganalogikan dalam sebuah garis lurus. Partai politik yang berada pada bagian kiri garis merupakan partai dengan spektrum ideologi kiri. Selanjutnya, partai politik yang berada di sebelah kanan garis merupakan partai dengan spektrum ideologi kanan. Sedangkan partai politik yang berada di tengah garis adalah partai politik dengan spektrum ideologi tengah. Artinya, semakin ke kiri suatu partai politik maka partai tersebut semakin sekuler. Sebaliknya, semakin ke kanan suatu partai maka akan semakin religius. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa partai-partai berkoalisi karena masing-masing memiliki kedekatan dalam orientasi kebijakannya. Partai-partai akan mencari anggota koalisi dari partai yang terdekat secara ideologis, yang dengan sendirinya tercermin pada orientasi kebijakan partai. Partai-partai politik tidak sekedar tergabung untuk merebut kekuasaan namun juga mempertimbangkan benar-benar kedekatan terkait dengan kebijakan masing-masing partai (Cipto, 2000).

Akan tetapi, perbedaan platform tersebut bukan berarti menepis wacana koalisi strategis diantara delapan partai tersebut. Pada konteks ini, aspek koalisi strategis dapat dijabarkan dari kesamaan persepektif partai tersebut dalam menilai regulasi-regulasi yang dibuat petahana. Penilaian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa regulasi yang dibuat petahana belum mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya. Sehingga delapan partai tersebut memiliki program-program tersendiri yang dapat diselaraskan, maka orientasi koalisi tersebut dibangun berdasarkan kesamaan program-program atau visi pembangunan yang akan diimplementasikan di Kota Surabaya.

## **2. Kesamaan Platform Partai Koalisi Pengusung Machfud Arifin - Mujiaman**

Robert Axelrod menjelaskan koalisi partai politik mestinya dibentuk secara *connected* yaitu terdiri dari partai partai yang sama dalam skala kebijakan dan meniadakan partner yang tidak penting. Koalisi atas dasar kesamaan tujuan kebijakan lebih penting dan stabil daripada atas dasar jumlah. Hal ini bertujuan agar dalam pemerintahan yang terbentuk dapat diminimalkan konflik kepentingan antara sesama anggota koalisi. Sementara Riker menilai jika koalisi bertumpu pada tujuan koalisi atau bersifat *office seeking* (memaksimalkan kekuasaan), sedang Axelrod menekankan partai sebagai *policy seeking* (menerapkan kebijakan sesuai program partai). Aspek *policy seeking* menekankan pada loyalitas anggota koalisi. Tetapi jika hanya didasarkan pada ukuran, loyalitas cenderung rendah, tergantung pada sejauh mana

pembagian keuntungan dalam koalisi dapat dibagi pada semua anggota koalisi. Maka yang dipentingkan adalah bagaimana koalisi dapat dibangun untuk mengusung program tertentu, bukan semata meraih kemenangan atau merebut kekuasaan.

Jika koalisi partai politik Machfud Arifin dilihat dari pemikiran Axelrod maka perlu diamati berdasarkan beberapa aspek titik temu. Pertama, apakah koalisi partai tersebut dibentuk atas dasar mengusung program kebijakan tertentu yang dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan pelaksanaan program partai politik. Artinya koalisi bukan semata atas dasar kesamaan ideologi tetapi lebih pada kesamaan program yang diusung. Partai-partai kemudian sepakat untuk bergabung terhadap koalisi yang mengusung figur yang dapat merepresentasikan dan menjalankan program tersebut.

Akan tetapi secara sederhana koalisi Machfud Arifin dibangun tidak memperhatikan kedekatan preferensi kebijakan, apalagi dalam praktiknya masalah ideologi partai amat jarang menjadi perhatian. Delapan partai tersebut secara ideologi banyak memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Seperti PKB yang memiliki haluan religius-nasionalis kecenderungan Islam tradisional dengan basis massa Nahdlatul Ulama (NU) identik dengan cinta terhadap negara Pancasila nyatanya dapat menerima perbedaan dengan PKS yang berhaluan Islam namun kecenderungannya agenda menerapkan syariat Islam di Indonesia. Juga dengan partai lainnya, seperti PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem dan PPP. Maka dengan gambaran tersebut, bahwa teori Axelrod tentang partai politik sebagai *policy seeking* dengan membangun koalisi atas dasar preferensi kebijakan, sulit diterapkan dalam kasus koalisi pengusung Machfud Arifin.

Gerindra misalnya, partai yang mengusung semangat nasionalisme ini secara nasional pernah menyokong Prabowo Subianto pada dua kali Pilpres melawan Joko Widodo. Namun demi ikut merapat kepada kekuasaan Gerindra kini mendukung pemerintahan Jokowi dengan Prabowo menjadi menteri pertahanan. Hal demikian juga berlaku surut ke bawah pada level daerah. Gerindra mendukung Machfud Arifin yang sebelumnya menjadi ketua Tim Kampanye Daerah Jokowi di Jatim. Kepentingan pragmatis Gerindra terlihat jelas dalam poros koalisi tersebut. Dari 8 partai tersebut secara kompak minim dalam upayanya melakukan penjaringan bakal calon secara serius.

Penjaringan bakal calon yang dilakukan seolah hanya formalitas untuk menarik simpati publik. Sebab tidak ada satu calon pun yang benar-benar didorong meski hanya menjadi bakal calon wakil Machfud Arifin. Seperti Zahrul Azhar Asumta yang nyata-nyata didorong oleh Gerindra dan Golkar sebagai wakil Machfud Arifin pada akhirnya tak dipilih karena ingin menjaga soliditas dan sinergitas koalisi. (Pridham, 1987) menerangkan bahwa terdapat faktor

internal partai yang menjelaskan tentang mekanisme pengambilan keputusan partai politik, baik itu untuk menentukan kandidat atau mitra koalisi.

Pemikiran (Axelrod et al., 1995) dapat menggambarkan koalisi partai politik dan kaitannya dengan masalah pertimbangan ideologis atau pragmatis. Tetapi pemikiran Riker condong ke arah pragmatis, sedang Axelrod menekankan sisi ideologis dalam koalisi. Kecenderungan pragmatis lebih kuat daripada preferensi ideologis dalam pembentukan koalisi. Pada akhirnya koalisi belum dibangun atas kepentingan bersama partai-partai yang bersifat *policy seeking* atau memperjuangkan program kebijakan untuk kepentingan rakyat secara luas. Koalisi masih dibentuk dengan menonjolkan aspek meraih kekuasaan (*office seeking*) yaitu partai-partai cenderung bertujuan memaksimalkan apa yang bisa mereka manfaatkan dari momen pemilihan kepala daerah.

Meski *office seeking* sebenarnya lebih relevan pada tingkat nasional karena terdapat pembagian jabatan di kabinet. Namun, kepentingan partai politik dari pusat juga memiliki kesinambungan di daerah, misalnya untuk mengamankan basis suara di daerah. Seperti pada kasus di Pilkada Cimahi 2017 terdapat koalisi mayoritas yang berlandaskan *office seeking* melawan petahana karena ingin mengamankan proyek nasional berupa kereta cepat yang melintasi wilayah tersebut (Azmi, 2017). Artinya kepentingan yang saling bertaut antara pusat dan daerah ini yang menyebabkan tidak membedakan pola koalisi di daerah maupun pusat. Ukuran partai menjadi tidak penting baik partai besar maupun partai kecil bertujuan memaksimalkan kekuasaan mereka dalam kapasitas masing-masing partai-partai kecil memfungsikan diri sebagai pencukup persyaratan.

Faktor ideologi, kepentingan dan kekuasaan biasanya selalu melekat sehingga partai didirikan adalah untuk mengakomodasi tiga hal tersebut. Namun partai politik kerap bersifat *office seeking* karena itulah yang melekat pada partai politik dalam meraih kekuasaan. Ideologi partai dapat digunakan untuk memberikan pedoman pada tindakan akal dan kepentingan yang selalu berubah setiap waktu. Dalam kenyataannya ideologi partai hanya dijadikan sekedar pembeda, tetapi belum menjadi identitas di mana konstituen dapat mengidentifikasi dirinya dengan partai lain.

Koalisi partai menjadi tidak mudah untuk diprediksi karena tidak selalu partai dalam spektrum kiri atau kanan berkoalisi dengan tetangga dekat mereka. Kecenderungan yang sering terjadi partai-partai dapat berkoalisi dengan partai manapun asalkan kepentingan memaksimalkan kekuasaan dapat mereka raih. Bagi partai politik, persoalan preferensi kebijakan yang akan perjuangkan belum menjadi agenda merdesak karena konstituen mereka pun kerap tidak mampedulikan hal tersebut.

### 3. Landasan Historis Koalisi Partai Pengusung Machfud Arifin -Mujiaman

Secara historis, koalisi pengusung Machfud Arifin sebenarnya terdapat benang merah. Partai Golkar misalnya, melalui fraksi di DPRD Kota Surabaya pada akhir 2019, mewacanakan untuk menggunakan hak interpelasi karena merasa kecewa dengan perlakuan Walikota Risma Triharini yang tidak menyambut agenda Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga politisi senior Golkar, Zainuddin Amali saat hendak melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Gelora Bung Tomo (GBT) pada Minggu (3/11/2019). Sidak tersebut dilakukan Menpora untuk mengecek kesiapan stadion yang bakal menjadi salah satu *venue* untuk Piala Dunia U-20 pada 2021. Sayangnya saat itu pintu stadion terkunci rapat. Dalam perjalanannya, rencana mengajukan hak interpelasi oleh Fraksi Golkar tidak hanya dikarenakan gagal agenda sidak Menpora ke Gelora Bung Tomo, tetapi juga didasari oleh tidak cakupannya Pemerintah Kota menyambut pejabat tinggi negara di wilayahnya

Konstelasi politik di Surabaya mulai menghangat menjelang pelaksanaan Pilkada pada 2020. Golkar berupaya mencari perhatian publik dengan permasalahan tersebut. Selain itu, banyak pengamat menilai upaya tersebut dimaksudkan untuk menurunkan citra Risma di penghujung kepemimpinannya. Sementara itu, Risma dibela PDIP sebagai partai pengusungnya pada pilkada tahun 2010 dan 2015. Fraksi PDIP meminta Fraksi Golkar untuk duduk bersama membicarakan permasalahan tersebut. Ketua Fraksi PDIP saat itu, Syaifuddin Zuhri mengumumkan akan *all out* berada di belakang Risma jika benar terjadi interpelasi. Syaifuddin mencoba memberi penjelasan kepada publik bahwa kejadian tersebut dilatarbelakangi adanya kurang komunikasi antara Menpora dengan Pemerintah Kota. Menurutnya kegiatan sidak oleh Menpora dilakukan pada waktu yang tidak tepat, yakni hari libur. Namun tak menunggu waktu yang lama, drama polemik hak interpelasi kepada Walikota Risma itu berakhir. Fraksi Golkar dan Pemkot Surabaya memilih berdamai setelah musyawarah dengan mediasi oleh pimpinan DPRD Surabaya.

Dari fenomena di atas, maka tidak heran jika pada Pilkada 2020, Golkar berusaha keras untuk mengusung calon walikota di luar kandidat yang dimunculkan PDIP. Golkar merasa mustahil bisa mengalahkan PDIP jika tidak menggabungkan kekuatan besar antarpartai politik. Arif Fathoni, Ketua DPD Golkar Surabaya mengatakan jalan satu-satunya untuk bisa menang di Pilkada Surabaya adalah melalui koalisi politik.

Pasca kekalahan partai-partai pada Pilkada Kota Surabaya tahun 2010 atas PDIP dengan calon walikota Tri Rismaharini, partai-partai di DPRD cenderung memilih untuk pasif dan terkadang bersikap oposisi. Hal itu terbukti ketika Pilkada tahun 2015, 8 partai itu memilih untuk abstain yang membuat pilkada hampir ditunda karena calon petahana tidak memiliki

lawan. Hanya PAN dan Demokrat yang akhirnya mengusung calon namun tidak berambisi untuk memenangkan pilkada. Rangkaian peristiwa politik selama Risma menjabat wali kota menjadikan partai-partai tersebut menghitung kekuatan untuk bersatu dalam melawan dominasi PDIP pada Pilkada 2020. Selain itu, bergabungnya PAN dan PPP dalam koalisi Machfud Arifin merupakan bentuk koalisi aktif, yakni koalisi yang sedang berlangsung.

Hal ini dikarenakan PAN dan PPP merupakan satu fraksi di DPRD dan beberapa kali mengkritisi Walikota Risma. Misalnya pada akhir masa jabatannya, Buchori Imron Ketua PPP Surabaya sekaligus anggota DPRD menyatakan Risma selama 10 tahun telah gagal membangun Kota Surabaya terutama di kawasan utara karena tidak memiliki perencanaan dan DED (*Detail Engineering Design*) yang matang setiap pembangunan wilayah, contohnya jembatan bambu yang dibangun di Kawasan Wisata Mangrove, Wonorejo, Rungkut dengan APBD senilai Rp 1,2 miliar yang tidak terawat dan beberapa bagian sisinya kondisinya ambruk. Dengan demikian, menjadi hal yang wajar bila PAN dan PPP berkoalisi pada momentum Pilkada.

#### **4. Motivasi Pragmatis Koalisi Pengusung Machfud Arifin – Mujiaman**

Gagasan pembaharuan Surabaya, khususnya dalam konteks kepemimpinan pemerintahannya, merupakan langkah awal PDIP untuk membangun koalisi partai politik. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai upaya dalam menumbangkan kekuasaan petahana. Sehingga dapat dipahami bahwa motif koalisi partai pendukung Machfud Arifin adalah bagaimana partai-partai tersebut dapat menumbangkan dan merebut kekuasaan dari petahana dan partai penguasa. Kepentingan terhadap aspek kekuasaan semata dapat dikatakan sebagai langkah pragmatis dari partai politik. Pada konteks ini, (Efriza, 2012) berpendapat bahwa koalisi yang terbentuk atas dasar kepentingan pragmatis, yakni untuk memperoleh kekuasaan semata disebut dengan koalisi taktis. Pola koalisi tersebut dapat terbentuk karena tiada lain koalisi merupakan alat atau strategi yang cukup efektif dalam memperoleh kekuasaan dan meraih suara.

Pada koalisi pengusung Machfud Arifin – Mujiaman tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat pola koalisi strategis dan taktis di dalamnya. Hal ini dapat kita lihat dari alasan partai-partai itu untuk berkoalisi. Motif yang dibangun adalah kesamaan visi pembangunan dan pembaharuan Kota Surabaya terhadap situasi aktual dan aspek kedaerahan. Sebagaimana koalisi strategis yang mengedepankan aspek ideologis, maka waktu itu delapan partai tersebut membangun komitmen untuk berkoalisi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa seiring dengan berjalannya dinamika politik dalam momentum Pilkada Surabaya 2020, Golkar mengubah

orientasinya dan berupaya untuk bersikap lebih taktis. Hal itu terlihat ketika Golkar kecewa saat nama yang didorong tidak dipilih Machfud Arifin sebagai wakilnya.

Koalisi taktis yang bersifat pragmatis tergambar dalam fenomena koalisi pengusung Machfud Arifin. Tidak ada komitmen utuh yang menjadikan koalisi tersebut dapat terus bertahan, di tengah gencarnya lobi politik antarpartai. Meski sempat kecewa berat disebabkan tak dipilihnya kader Golkar sebagai calon wakil wali kota pendamping Machfud Arifin, Golkar tak memiliki pilihan lain. Untuk mengalihkan dukungan misalnya tidak mungkin bisa dilakukan sementara PDIP sudah mendeklarasikan diri tidak membutuhkan koalisi untuk mengajukan calon. Sementara itu, PPP menimbang bahwa calon yang diusung tidak cukup hanya modal elektabilitas. Tetapi terkait persoalan pembiayaan operasional politik pada proses Pilkada menjadi bagian penting yang harus dimiliki calon.

Hal ini selaras dengan apa yang dimaksud (Mair & Katz, 2002) bahwa partai politik memiliki kepentingan kolektif, sehingga koalisi dapat dilakukan dengan menyampingkan aspek ideologis. Maka dari itu, pembentukannya bersifat insidental, dinamis, dan proporsional. Dengan demikian, motif koalisi Golkar menjelang akhir pendaftaran selaras dengan pernyataan (Efriza, 2012) mengenai koalisi taktis, yakni koalisi yang terbentuk karena tidak didasari oleh pertimbangan kebijakan. Melainkan koalisi tersebut dapat terbentuk karena kesepakatan partai politik dan kandidat mengenai pembiayaan operasional yang akan diterima mereka ketika proses pemenangan berlangsung, serta beberapa komitmen lainnya, ketika kandidat tersebut berhasil meraih kemenangan, sehingga mendapatkan kekuasaan.

Modal finansial tersebut menjadi kunci dalam merealisasikan ambisi delapan partai untuk menumbangkan kekuasaan PDIP. Melalui modal finansial yang dimiliki Machfud Arifin dan Mujiaman, partai-partai yakin dapat meningkatkan popularitas dan elektabilitas kandidat di Surabaya. Selain itu, dengan dukungan finansial yang tinggi, dapat membangun kekuatan politik partai-partai yang lebih mapan, baik itu membangun dukungan massa.

Pola-pola taktis yang dilakukan setiap partai politik tersebut, mengisyaratkan bahwa kepentingan utama dari partai politik dalam Pilkada adalah meraih kemenangan. Sehingga partai politik dapat memperoleh berbagai *benefit* dari kemenangan tersebut, baik secara strategis maupun taktis. Pada konteks strategis, kepentingan ideologis atau program-program partai politik dapat diakomodasi, sehingga dapat diimplementasikan ketika pemerintahan berlangsung.

Sedangkan dalam konteks taktis atau pragmatis, terdapat berbagai insentif yang didapatkan Parpol pasca Pilkada, seperti halnya keuntungan dari mahar politik dan operasional pemenangan Pemilu. Kemudian, apabila kandidat yang diusungnya berhasil

memenangkan Pilkada, maka Parpol di daerah mendapatkan pembiayaan operasional partai secara berkesinambungan serta dapat lebih leluasa mengakses peluang-peluang proyek pembangunan dan bantuan pemerintah di daerah. Dengan demikian, partai politik dapat memanfaatkan jejaring pemenang Pemilu untuk memaksimalkan kekuasaannya dalam pemerintahan.

Perjalanan Machfud Arifin dalam upaya melakukan lobi-lobi politik untuk membentuk koalisi partai mayoritas melewati jalan yang unik. Machfud Arifin menjadi figur yang menjadi pilihan partai mayoritas di tengah kebimbangan partai untuk memunculkan calon alternatif. Tidak bisa diragukan bahwa proses pembentukan koalisi partai mayoritas pengusung Machfud Arifin dan Muji Aman di atas terlihat bahwa figur calon walikota memiliki peran sentral. Machfud Arifin turut aktif dalam proses lobi-lobi hingga pembentukan 8 partai politik anggota koalisi tersebut. Berikut adalah langkah-langkah Machfud Arifin dalam menggalang kekuatan koalisi:

- a. Machfud Arifin melamar ke partai-partai politik untuk mendapatkan dukungan sebagai calon walikota.
- b. Machfud Arifin melakukan lobi-lobi internal partai untuk mendapatkan rekomendasi. Bahkan ia melakukan lobi hingga DPP.
- c. Pendanaan dalam tahapan pilkada yang dilakukan partai politik diamankan oleh Machfud Arifin. Sehingga mahar politik yang umumnya digunakan untuk membeli surat rekomendasi secara tidak langsung dialokasikan untuk operasional pencalonan.

Kondisi demikian, terkonfirmasi oleh seluruh partai politik pengusung Machfud Arifin bahwa kandidatlah yang memiliki peran penting dalam pembentukan koalisi partai. Bahkan komunikasi antarpartai politik difasilitasi oleh Machfud Arifin. Seperti ketika Machfud Arifin memutuskan untuk memilih Muji Aman sebagai pendampingnya menimbulkan banyak kekecewaan dari beberapa partai pendukung. Untuk tetap merangkul seluruh partai yang telah mendukungnya, ia mengundang seluruh partai koalisi untuk mengenal lebih dalam terhadap Muji Aman.

### **5. Tingkat Motivasi Koalisi Mayoritas Pengusung Machfud Arifin**

Proses pembentukan koalisi partai politik Machfud Arifin merupakan kinerja banyak pihak yang saling terkait dengan tujuan yang sama dalam pilkada Kota Surabaya. Pertama dari sisi aktor, proses pembentukan koalisi melibatkan setidaknya tiga aktor yaitu pengurus tingkat daerah (DPD), bakal calon kepala daerah, dan pimpinan/pengurus DPP partai. Lebih dari itu, koalisi juga dilandasi oleh beberapa faktor dalam pembentukannya. Sehingga, semakin banyak anggota koalisi maka semakin banyak juga mengakomodasi kepentingannya. Setiap partai

memiliki motivasi masing-masing dalam koalisi politik. Namun motivasi biasanya memiliki kecenderungan yang hampir sama dalam membangun koalisi. Berikut adalah tingkat motivasi koalisi partai pengusung Machfud Arifin – Mujiaman.

Tingkat pengaruh tiga faktor akan diuraikan pada bagian sub bab ini. Terdapat tingkatan yang secara kualitatif memiliki pengaruh yang rendah, artinya tanpa adanya faktor ini pengusungan calon kepala daerah masih dapat dilakukan. Pengaruhnya tidak mutlak artinya sekalipun faktor ini ada tetapi dampaknya tidak terlalu signifikan. Ada pula faktor yang memiliki tingkat pengaruh sedang, artinya faktor Ini harus ada untu membentuk koalisi. Tetapi pengaruhnya relatif tergantung pada kemampuan figur bakal calon kepala daerah dalam mengatur strategi dan lobi-lobi politiknya. Terakhir ada faktor yang memiliki tingkat pengaruh tinggi, artinya sangat monentukan proses pembentukan koalisi dan pencalonan. Faktor ini sangat signifikan dalam mendorong ada tidaknya koalisi serta figur yang akan dicalonkan. Untuk menjelaskan tingkat pengaruh tiga faktor tersebut, peneliti akan menjelaskan lebih rinci pada tabel berikut ini.

**Tabel 2**  
**Tingkat Motivasi Koalisi Partai Pengusung Machfud Arifin – Mujiaman**

<b>Faktor</b>	<b>Proses</b>	<b>Tingkat Pengaruh</b>
Ideologis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai menelaah kesamaan platform dalam membangun koalisi</li> <li>2. Partai mengusung mengusung visi yang sama dalam merebut kekuasaan</li> <li>3. Partai melakukan pendekatan dengan kandidat yang mampu mewakili visi partai</li> </ol>	<p>Rendah</p> <p>Umumnya, partai hampir tak memaksimalkan motivasi ideologis dalam merebut kekuasaan. (Placeholder1)</p>
Historis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Antarpartai telah menjalin hubungan sebelum pilkada</li> <li>2. Antarpartai terlibat koalisi aktif (satu fraksi di DPRD, memiliki posisi yang sama, misal: oposisi)</li> </ol>	<p>Tinggi</p> <p>Hubungan antarpartai yang telah terjalin memungkinkan kemudahan dalam membentuk koalisi</p>
Pragmatis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai berorientasi merebut kekuasaan</li> <li>2. Partai mempertimbangkan tingkat keterpilihan kandidat (kader maupun non kader)</li> <li>3. Partai mengkapitalisasi keuntungan dalam pilkada</li> </ol>	<p>Tinggi</p> <p>Partai memiliki kecenderungan menumbangkan kekuasaan yang telah mapan. Motivasi kekuasaan ini menjadikan partai-parti mudah menemukan kesepakatan</p>

Dari uraian di atas terlihat platform ideologi tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Padahal jika platform tersebut dimanfaatkan secara maksimal sebetulnya dapat menjadi alasan penting dalam pembentukan koalisi secara ideal. Jika partai yang mampu

menerjemahkan platform partainya ke dalam program-program kampanye dan inisiatif kebijakan, merupakan nilai tambah bagi partai tersebut. Persoalannya, pembentukan koalisi partai dalam pilkada amat jauh dari masalah program. Partai memang bertujuan meraih kekuasaan (*office seeking*) namun pada tingkat lanjut, selain meraih kekuasaan partai juga harus mampu memanfaatkan kekuasaan yang diraihinya untuk menerapkan program-program berdasarkan platform partainya (*policy seeking*). Koalisi Machfud Arifin di atas tidak dipengaruhi oleh keberhasilan dengan menggugulkan platform partai. Maka faktor ini nyaris tidak ada pengaruhnya dalam pembentukan koalisi.

Socio-historis koalisi Machfud Arifin juga telah terjalin dari beberapa kali pilkada sebenarnya. Pada pilkada 2015 saja, partai-partai di luar PDIP memilih abstain tidak mengikuti kontestasi kecuali Demokrat dan PAN yang masih mengusung pasangan calon di detik-detik terakhir menjelang penutupan pendaftaran di masa perpanjangan. Setidaknya kondisi demikian secara tidak langsung memposisikan partai-partai non PDIP berada di luar bagian dari pemerintahan. Perjalanan tersebut maka tidak menutup kemungkinan jika partai-partai tersebut mengumpulkan kekuatan untuk berusaha keras menumbangkan kekuasaan PDIP pada Pilkada tahun 2020.

Faktor pragmatis inilah yang mendominasi motivasi partai-partai untuk berupaya menyeleksi kandidat potensial untuk diusung melawan siapapun calon yang diusung oleh PDIP. Membaca secara realistis bahwa untuk menjadi pemimpin koalisi harus memiliki modal kursi yang tinggi, maka partai-partai tersebut tidak lagi mengedepankan *egoisme* partai. Figur Machfud Arifin yang berlatar non partai dianggap sebagai penengah antarpartai untuk berada pada posisi yang sama. Figur Machfud Arifin memiliki tingkat pengaruh yang tinggi terlebih memiliki modal logistik atau finansial untuk kebutuhan panggangan sekaligus pemberdayaan jaringan partai.

Selain itu, figur bakal calon kepala daerah menjadi alasan partai melakukan tindakan rasional dalam memaksimalkan kepentingannya, potensi sumber daya yang dimiliki. Memahami perilaku politik individu dan institusi yang terdiri dari individu-individu berpengaruh. Menurut banyak peneliti, kekuasaan politik merupakan proses negosiasi elit untuk bertahan selama mungkin dalam kekuasaan. Institusi memiliki nilai dan kepentingan yang dibangun atas dasar pergumulan elit di dalamnya. Jadi memahami cara berpikir individu dalam mengambil keputusan acalah bagian awal untuk memahami bagaimana kekuasaan dijalankan. Schumpeter dan Anthony Downs dengan latar belakang ekonominya memandang politik sebagai permainan yang dimainkan oleh orang kuat untuk mengamankan kepentingan pribadi mereka sendiri (Terchek et al., 2001).

Pilihan rasional mencoba melihat perilaku individu dalam mengambil keputusan akan berusaha memaksimalkan manfaat yang bakal dimilikinya jika dihadapkan pada pilihan-pilihan yang ada. Individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pribadi mereka. Perilaku rasional dapat diidentifikasi dengan memaksimalkan beberapa pilihan. Pendekatan ini melihat bahwa keputusan politik adalah reaksi dari perilaku-perilaku individu dalam memaksimalkan kepentingan pribadi mereka. Dalam setiap proses negosiasi politik, tindakan rasional adalah kemampuan para individu yang terlibat untuk melihat keuntungan apa yang bisa dimaksimalkan, dan kerugian apa yang bisa diminimalkan. Perilaku ekonomi ini berlaku dalam kompetisi politik. Pemilu pada dasarnya dilihat sebagai proses pertukaran kepentingan antara politisi dengan pemilih.

Masing-masing diposisikan dalam kerangka memaksimalkan kepentingan mereka untuk tujuan-tujuan yang dianggap rasional. Pilkada dalam hal ini merupakan sumber kekuasaan baru, baik secara finansial maupun akses politik. Pengurus tingkat daerah melihat ada peluang untuk lebih dekat kepada sumber finansial yaitu melalui calon yang diusungnya. Di sisi lain, partai melihat ada kebutuhan pendanaan yang dapat diraih melalui pencalonan dalam Pilkada. Kepentingan ini bertemu pada figur bakal calon kepala daerah.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembentukan koalisi partai politik pendukung Machfud Arifin – Mujiaman pada Pilkada Surabaya 2020. Sehingga diketahui bahwa proses terbentuknya Koalisi Machfud Arifin merupakan wacana dari partai-partai di luar PDIP yang menggaungkan pembaharuan kepemimpinan Surabaya. Munculnya figur Machfud Arifin sebagai kandidat disambut hangat oleh delapan partai tersebut. Popularitas Machfud Arifin di Surabaya dianggap peluang bagi partai-partai untuk mengusungnya sebagai calon potensial. Di sisi lain, survei elektabilitas menempatkan nama Machfud Arifin sangat berpeluang menang pada pilkada jika mendapat kendaraan politik yang besar. PAN misalnya merasa jika figur Machfud Arifin mampu mengalahkan siapapun kandidat yang diusung PDIP. Selain itu, PAN kemenangan bisa diraih jika seluruh partai bersatu atau membentuk pola koalisi *office seeking* untuk mengusung Machfud Arifin, artinya pilkada harus digelar *head to head*. Keyakinan delapan partai dalam mengusung Machfud Arifin selain karena pengalaman leadership yang telah terasah selama berkarier di dunia kepolisian juga karena jejaring dan modal finansial yang dianggap mumpuni. Tidak dipungkiri bahwa dalam kontestasi pilkada, kandidatlah yang harus membiayai selama proses kampanye dan lain sebagainya. Sebagian besar partai anggota koalisi mendukung Machfud Arifin

meminta komitmennya agar turut memberikan *support* terhadap partai dalam menghadapi pemilu legislatif yang akan datang. Partai dengan kursi minimal berharap dengan dengan figur Machfud Arifin jika telah menjadi wali kota bisa ikut andil membantu menambah perolehan kursi di DPRD. Bantuan tersebut bisa berupa finansial maupun pengaruh figur Machfud Arifin untuk menarik pemilih terhadap partai pengusung.

Koalisi dapat diperhatikan dari beberapa faktor yang sangat berpengaruh seperti ideologis (kesamaan platform), historis, dan terakhir pragmatis (perebutan kekuasaan) dalam proses pembentukan koalisi. Inti dasar dari dimensi ini adalah suatu koalisi antar partai politik bisa terbentuk atas dua hal, yaitu atas dasar kedekatan kebijakan (*trade-off*) antara tujuan "*office seeking*" dan komitmen terhadap suatu kebijakan. Biasanya motivasi di antara mitra koalisi bertemu atas isu-isu kebijakan, seberapa jauh prioritas isu tersebut dapat berhubungan dengan strategi atau identitas partai. Namun dalam koalisi mayoritas Machfud Arifin dibangun tidak memperhatikan kedekatan preferensi kebijakan, apalagi dalam praktiknya masalah ideologi partai amat jarang menjadi perhatian. Delapan partai tersebut secara ideologi banyak memiliki perbedaan yang secara prinsip terkadang berseberangan. Sehingga motivasi koalisi atas dasar platform sangat rendah pengaruhnya dalam pembentukan koalisi mayoritas Machfud Arifin tersebut. Faktor historis, partai koalisi pengusung Machfud Arifin sebenarnya sudah terjalin sejak lama di Surabaya. Maksudnya, partai-partai tersebut memposisikan diri pada gerbong yang sama. Pasca kekalahan partai-partai pada Pilkada Kota Surabaya tahun 2010 atas PDIP dengan calon wali kota Tri Rismaharini, partai-partai di DPRD cenderung memilih untuk pasif dan terkadang bersikap oposisi.

Pola koalisi Machfud Arifin lebih dominan mengarah pada pola pragmatis. Tidak ada komitmen utuh yang menjadikan koalisi tersebut dapat terus bertahan, di tengah gencarnya lobi politik antarpartai. Seperti contoh, meski sempat kecewa berat disebabkan tak dipilihnya kader Golkar sebagai calon wakil wali kota pendamping Machfud Arifin, Golkar masih tetap memutuskan untuk mendukung Machfud Arifin. Karena pada prinsipnya, Golkar hanya ingin turut menang dalam pilkada. Kendati demikian, Machfud Arifin melakukan lobi ke DPP dalam penyelesaian masalah tersebut. Hal serupa juga terjadi di tubuh partai anggota koalisi lainnya. Terkait persoalan pembiayaan operasional politik pada proses Pilkada menjadi bagian penting yang harus dimiliki calon. Machfud Arifin sebagai kandidat memiliki kekuatan itu.

**Daftar Pustaka**

- Ardiani, D., Kartini, D. S., & Herdiansyah, A. G. (2019). Strategi Sosialisasi Politik Oleh Kpu Kabupaten Ngawi Untuk Membentuk Pemilih Pemula Yang Cerdas Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 Di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 6(1), 18–32.
- Axelrod, R., Mitchell, W., Thomas, R. E., Bennett, D. S., & Bruderer, E. (1995). Coalition formation in standard-setting alliances. *Management Science*, 41(9), 1493–1508.
- Azmi, M. F. (2017). *Pembentukan Koalisi Partai Politik Pendukung Ajay-Ngatiyana Pada Pilkada Kota Cimahi Tahun 2017*.
- Budiarjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. cet. ke 4. PT. Gramedia Jakarta.
- Cipto, B. (2000). *Partai, Kekuasaan dan militerisme*. Pustaka Pelajar.
- Duverger, M. (1981). *Les partis politiques*. FeniXX.
- Efriza, P. E. (2012). Sebuah Kajian Ilmu Politik. *Bandung: Alfabeta*.
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 1–17.
- Jalal, A. (2021). SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN SOESILO BAMBANG YUDHOYONO (2004-2014). *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 166–184.
- Kumolo, T. (2015). Politik Hukum PILKADA Serentak Bandung. *PT Mizan Publika*.
- Lijphart, A. (1984). Measures of cabinet durability: A conceptual and empirical evaluation. *Comparative Political Studies*, 17(2), 265–279.
- Mair, P., & Katz, R. (2002). The ascendancy of the party in public office: party organizational change in twentieth-century democracies. *Political Parties*, 24, 113–136.
- Makhasin, L. (2016). Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19(3), 234. <https://doi.org/10.22146/jsp.15685>
- Marijan, K. (2019). *Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca orde baru*. Kencana.
- Moleong, L. J. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif eds. *Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset*.
- Nurhasim, M. (2018). Koalisi Nano-Nano Pilkada Serentak 2018. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 129. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.760>
- Pridham, G. (1987). Coalition behavior and party systems in western Europe: A comparative approach. *Parliamentary Affairs*, 40(3), 374–387.

---

<https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.pa.a052106>

Sabatier, P. A. (1999). *Theories of the policy process: Theoretical lenses on public policy.*

*Boulder: Westview.*

Skjæveland, A., Serritzlew, S., & Blom-hansen, J. (2007). Theories of coalition formation:

An empirical test using data from Danish local government. *European Journal of*

*Political Research*, 46(5), 721–745.

Terchek, R. J., Conte, T. C., Locke, J., Paine, T., Madison, J., Tocqueville, A., Mill, J. S.,

Rawls, J., Aristotle, & Machiavelli, N. (2001). *Theories of democracy: A reader.*

Rowman & Littlefield Lanham.

Yin, R. K. (2013). *Desain dan Metode Studi Kasus. Rajawali Pers.*